

RINGKASAN

Sopia Rahma
210510154

**“Analisis Tindak Pidana *Skimming* Melalui
Internet (Studi Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN
Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk)”
(Romi Asmara, S.H.,M.Hum. dan Hidayat,S.H.,M.H.)**

Kejahatan terhadap teknologi informasi sering kali terjadi karena adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk melakukan atau menciptakan suatu informasi yang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada putusan no. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan putusan no. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk dimana hakim memutuskan keduanya dengan menggunakan undang-undang yang berbeda. Hakim tidak mempertimbangkan dari mana asal data nasabah yang diperoleh oleh kedua terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan putusan nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu putusan no. 569/pid.sus/2022/pn btm dan putusan no. 78/pid.sus/2022/pn yyk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan Tindak pidana mengcopy data diri nasabah menggunakan alat *skimmer* atau teknologi lainnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana pasal-pasal mengenai akses ilegal terhadap orang lain dengan menggunakan teknologi internet diatur pada Pasal 27 hingga Pasal 36. Lalu pada pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hakim mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan akan tetapi hakim juga harus memperhatikan fakta-fakta hukum untuk mempertimbangkan keputusannya, pada putusan no. 78/pid.sus/2022/pn yyk hakim memutuskan dengan menggunakan Pasal 81 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tanpa memperhatikan fakta-fakta lain mengenai pemerolehan data nasabah dan tanpa mempertimbangkan mengenai keterangan dari para saksi yang menunjukkan bahwa adanya indikasi *skimming*.

Dengan demikian perlu adanya aturan khusus mengenai warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia meskipun aturan tertulis sudah ada dan harus dipatuhi tetapi itu tidak mengurangi tindak kejahatan yang ada di Indonesia dikarenakan banyaknya yang melakukan tindak pidana *skimming* itu merupakan warga negara asing.

Kata kunci : *Skimming*, Tindak Pidana *Cyber*, Putusan Hakim.

SUMMARY

Sopia Rahma
210510154

***“Analysis of The Crime of Skimming Through
Internet(Study of Decision No. 569/Pid.Sus/2022/PN
Btm and Decision No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk)”***
(Romi Asmara, S.H.,M.Hum. dan Hidayat,S.H.,M.H.)

Crimes against information technology often occur because of the existence of computers and the internet as a means for humans to carry out or create information that is useful for themselves or for others. As happened in decision no. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm and decision no. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk where the judge decided both using different laws. The judge did not consider where the customer data obtained by the two defendants came from.

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts committed by the defendant and to analyze the judge's consideration in decision number 569/Pid.Sus/2022/PN Btm and decision number 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach, namely decision no. 569/pid.sus/2022/pn btm and decision no. 78/pid.sus/2022/pn yyk.

The results of the first research show that the qualifications of the criminal act of copying customer personal data using a skimmer or other technology are specifically regulated in the Electronic Information and Transaction Law (ITE), where articles regarding illegal access to others using internet technology are regulated in Article 27 to Article 36. The results of the second discussion show that judges have the authority to make decisions but judges must also pay attention to legal facts to consider their decisions, but in decision no. 78/pid.sus/2022/pn yyk the judge decided using Article 81 of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers without paying attention to other facts regarding the acquisition of customer data.

Thus, it is necessary to have special rules regarding foreign nationals who commit criminal acts in Indonesia even though written rules already exist and must be obeyed, it does not reduce crimes in Indonesia because many who commit skimming crimes are foreign nationals.

Keywords: Skimming, Cyber Crime, Judge's Decision.